

Bekasi pada Masa Kolonial (1925-1945)

Pancar Catur Ramdiansyah
Jurusan Ilmu Sejarah dan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: pancarcatur@gmail.com

Abstract

The colonial period in Indonesia was filled with several historical events. All of Indonesia's territory at that time was controlled by the colonialists. This also happened in the Bekasi area. This study will discuss the conditions of the Bekasi area during the colonial period. During the reign of the Dutch East Indies, Bekasi was one of the districts (kewedanan) of the regenschap of Meester Cornelis, the residency of Batavia. Then during the Japanese occupation between 1942-1945, it changed its name to Bekasi Gun. In addition, a review of the geographical conditions was also carried out when Bekasi was still a kewedanan. Then, the ethnic groups that occupy the Bekasi area are identified, namely the Sundanese, the Bekasi-Malay ethnic, and the Javanese ethnicity. Identification is also useful for getting a fairly clear picture of the cultural structure, social structure, economic structure, as well as the government system in Bekasi during the colonial period.

Keywords: *Bekasi, Colonial, Historiography.*

Pendahuluan

Bekasi adalah sebuah kota di Jawa Barat, Indonesia yang terletak di perbatasan timur Jakarta. Bekasi adalah salah satu kota tertua di Indonesia, dan memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Bekasi merupakan salah satu distrik (kewedanan) dari afdeeling/regenschap Meester Cornelis, residensi Batavia.¹ Berdasarkan Citra Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Arsip 1800-1900, Bekasi di akhir abad ke-19 dipenuhi tanah-tanah partikelir. Artinya banyak tuan tanah yang memiliki tanah yang luas. Sehingga menyebabkan banyak rakyat menderita karena harus membayar sewa tanah yang mahal. Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945, status Bekasi tetap mejadi kewedanan namun berganti nama menggunakan bahasa Jepang dengan sebutan *Bekasi Gun*. kondisi masyarakat Bekasi tidak jauh berbeda bahkan memburuk. Karena harus menyerahkan seluruh kepemilikan hasil bumi serta hewan ternak. Berdasarkan dinamika tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti kondisi daerah Bekasi terutama dalam beberapa aspek seperti sturktur sosial, ekonomi, pemerintahan maupun budaya.

¹ *Encyclopaedie van Nederlandsche-Indie Eerste Deel* (Leiden: N.V v/h E.J Brill, 1917), 22.

Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan kembali peristiwa bersejarah ini, penulisan menggunakan studi perpustakaan dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan, yaitu arsip-arsip baik yang terdapat di Pemda Tk. II Bekasi, Arsip Nasional RI, Arsip Kementrian Jajahan (Algemeene Rijkssaarscheif) di Den Haag negeri Belanda; surat kabar, buku-buku dan artikel. Selain itu metode penelitian sejarah yang digunakan dalam penulisan ini meliputi empat tahap penelitian sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, Historiografi.² Dilanjutkan dengan tinjauan kondisi geografi ketika Bekasi masih menjadi kewedanan. Tinjauan dilakukan untuk mengungkap wilayah Bekasi, baik dari segi luas maupun implikasinya karena sejarah tidak bisa dilepaskan dari segi ruang dan waktu. Identifikasi etnis-etnis yang menempati wilayah Bekasi, yakni etnis Sunda, etnis Melayu-Bekasi, dan etnis Jawa. Identifikasi etnis di Bekasi dilakukan karena mereka merupakan subjek sejarah. Identifikasi juga berguna untuk mendapatkan gambaran yang cukup jelas terkait kondisi masyarakat pada masa itu, baik ditinjau secara budaya, sosial, ekonomi, maupun, sistem pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

A. Geografi Bekasi

Pembahasan daerah Bekasi secara geografi, sangat dipengaruhi oleh keputusan politik pemerintah yang menetapkan batas-batas wilayahnya. Tentunya untuk mengutamakan kepentingan dan kelancaran administratif pemerintah. Berdasarkan kepentingan penelitian ini, penulis mengkaji hal itu dari dua periode, yaitu periode kekuasaan pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1800-1942. Periode kedua pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942-1945 sebelum proklamasi kemerdekaan.

Secara geografis Bekasi terletak di pantai Utara Pulau Jawa yang membujur antara 106° 48' 79" - 107° 07' 29" BT, dengan luas wilayah sekitar 39.000 hektar. Di sebelah barat berbatasan dengan distrik Meester Cornelis dan regenschaap Batavia, di sebelah timur berbatasan dengan distrik Cikarang dan residensi Karawang, disebelah selatan berbatasan dengan regenschap Buitenzorg dan residensi Cianjur, sedangkan disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Kepulauan Seribu. Batas wilayah umumnya ditandai dengan sungai, bukit, laut, dan batas tanah antara tuan tanah.

Kewedanan Bekasi beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau, terdapat sungai yang melewati kewedanan Bekasi, yakni Sungai Bekasi dan Sungai Jambe. Kondisi topografinya terdiri dari dataran rendah yang digunakan sebagai perkebunan di daerah Teluk Pucung dan Cakung. Juga terdapat

² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), XIX.

perikanan di rawa-rawa seperti Rawa Kalong, Rawa Duku, Rawa Panjang, Rawa Roko, Rawa Sapi, Rawa Panggulan, Rawa Pasung, Situ Cerewet, dan perikanan laut di Marunda. Di tempat-tempat lainnya berupa persawahan-persawahan seperti di Tanah Dua Ratus Lima, Teluk Pucung, Kedung Gede, Cerewet, Pengasingan, Jati, Kandang, dan Bulu.

B. Etnis Penduduk Bekasi

Penduduk Kewedanan Bekasi mayoritas adalah etnis Melayu–Betawi dengan jumlah 154.470 jiwa pada tahun 1927.³ Jika ditinjau dari bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari juga budaya serta tradisi, terdapat dua etnis mayoritas, yaitu etnis Melayu yang berdialek Betawi dan etnis Sunda yang berbahasa sunda. Sebagian kecil etnis Jawa, dan etnis lainnya yang tersebar yaitu, Padang, Ambon, Batak, Cina dan Arab.⁴ Sehingga menyebabkan terjadinya proses asimilasi dan akulturasi. Namun, ciri-ciri khas tradisi mereka masing-masing masih dipertahankan.

Keberadaan penduduk yang berasal dari berbagai etnis tersebut telah mempengaruhi pola hidup dan bahasa. Oleh karena itu, dialek masyarakat Bekasi akan terdengar berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, hal itu mempengaruhi pula perkembangan kebudayaan Bekasi yang pada dasarnya campuran budaya Sunda, Jawa, Cina, Eropa (barat), dan Islam yang tercermin dalam berbagai jenis kesenian di Bekasi.

C. Struktur Pemerintahan

Di dalam *Staatsblad* (lembaran negara) 1925 No.383 tertanggal 14 Agustus 1925 dan mulai berlaku 1 Januari 1926 disebutkan bahwa *Regentschap Meester Cornelis*, terdiri atas empat distrik, yaitu *Meester Cornelis*, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Distrik Bekasi dibagi dalam tiga onderdistrik yang didalamnya terdapat tanah-tanah dan dibagi lagi dalam kesatuan administrasi terkecil yang disebut kampung.⁵

Struktur pemerintahan Daerah *Regentschap Meester Cornelis* di Keresidenan Batavia pada tahun 1925 sebagai berikut:⁶

- Gubernur : W.P. Hillen
Residen Batavia : J.Ch. De Bergh
1. Regentschap Batavia
- Asisten Residen : P.H. Willemse

³ *Memori Serah Terima Jabaran 1921-1930 (Jawa Barat)* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1976).

⁴ Nana Suparman, *Mengenal Bekasi Kota Patriot* (Bekasi: Rahman Press, 1985). hal: 193

⁵ Mr. L. W. C. Van den Berg, *Het Inlandshe Gemeentewezen op Java en Madoera*, dalam BKI (1901)

⁶ "Regeering Alamanak" (Batavia, 1927), 290–92.

- Regent (Bupati) : R.A.A. Achmad Djajadiningrat
2. Regentschap Meester Cornelis
- Asisten Residen : A.E. Catalami
 - Regent (Bupati) : R. Tumenggung Abdurachman
 - Patih : R. Adinegara
- Regentschap Secretaris : R. Djajasman
Wedana (kepala distrik) di Regentschap Meester Cornelis :
1. Meester Cornelis : R. Sujito Muktisangkojo
 2. Kebayoran : R. Munji
 3. Bekasi : R. Kantasuminta
 4. Cikarang : Mas Atnawiria

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 terjadi reorganisasi dan terdapat beberapa perubahan nama organisasi pemerintahan dan nama tempat. Salah satunya yakni perubahan nama *Regentschap Meester Cornelis* menjadi *Jatinegara Ken* berdasarkan Oendang Oendang No. 30 tahun 1942 tentang perubahan nama negeri dan nama daerah, tepatnya tanggal 1 September 1942.

Isi undang-undang tersebut yakni sebagai berikut:

Wilayah **OENDANG-OENDANG NO.30 TAHOEN 2602**

Tentang Mengoebah Nama Negeri dan Nama Daerah

Nama negeri dan nama daerah jang dibawah ini daerah sebagai berikoet:

1. **Java** dioebah menjadi **Djawa**
 2. Jang dimaksoed dengan **Djawa** dalam pengertian pemerintah ialah *Poelaoe Djawa sadja selanjotnya akan diseboet **Poelaoe Djawa***
 3. **Meester Cornelis** doebah menjadi **Djatinegara**
- Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, Boelan 9, Tahoen Syoewa (2602)*

Batavia, tanggal 1, Boelan 9

Tahoen Syoewa 17 (2602)

Panglima Besar Balatentara Dai Nippon⁷

Jatinegara berdasarkan maklumat *Batavia Syuu* No.1 tahun 1942 tentang pembagian wilayah di keresidenan Batavia dibagi tuga Gun, yakni:

- I. Cawang-Jatinegara, berpusat di Cawang Gun, terdiri dari :
 1. Pondok Gede son, tempat kedudukan *son*tyo berada di Pondok Gede kulon
 2. Pasar Rebo son, tempat kedudukan *son*tyo berada di Kramatjati
 3. Pulogadung son, tempat kedudukan *son*tyo berada di Pulogadung.
 4. Pasar Minggu son, tempat kedudukan *son*tyo berada di Pasar Minggu.
- II. Bekasi gun daerahnya meliputi :
 1. Bekasi son, tempat kedudukan *son*tyo berada di Bekasi

⁷ Oendang-oendang No. 30 tentang Mengoebah Nama Negeri dan Nama Daerah. Kan Po No. 2 tahun ke 1 bulan 9-2602, 3

2. Cibitung son, tempat kedudukan *son* berada di Cibitung
 3. Cilincing son, tempat kedudukan *son* berada di Cilincing
- III. Cikarang gun daerahnya meliputi:
1. Cikarang son, tempat kedudukan *son* berada di Cikarang.
 2. Sukatani son. tempat kedudukan berpusat di Srengseng.
 3. Cabangbungin son, tempat kedudukan *son* berada di Cabangbungin.
- Batavia, tanggal 20 *boelan* 11 *tahoen* *Syoowa* 17 (2602)

Berdasarkan maklumat di atas, dapat diketahui bahwa Bekasi gun terdiri atas tiga Son dan lima belas daerah adat (kampung). Bekasi Gun dipimpin oleh seorang Guntyo. Masa itu Gontyo dijabat oleh Rukadi. Son (kecamatan) dipimpin oleh orang Indonesia sampai bentuk yang terendah, yakni Ku.

Terdapat beberapa perbedaan apabila melihat luas pembagian wilayah tersebut jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada masa Regentschap Meester Cornelis dan masa Jatinegara Ken, wilayahnya meliputi Jatinegara-Kebayoran, Mauk, Bekasi, dan Cikarang. Kabupaten Jatinegara hanya meliputi daerah Kewedanan Bekasi dan Kewedanan Cikarang yang mendapat tambahan Kecamatan Cibusah (Cibusah masa kolonial Belanda merupakan salah satu onder distrik di Regentschap Buitenzorg). Kedua kewedanan tersebut kemudian dipecah menjadi empat, yaitu Kewedanan Bekasi, Tambun, Cikarang, Srengseng. Bupati Kabupaten Jatinegara Pada waktu itu dijabat oleh R. Umar Said.⁸

D. Struktur Sosial

Distrik Bekasi terkenal sebagai daerah pertanian yang sangat subur, namun sistem kepemilikan tanahnya banyak dikuasai oleh tuan-tuan tanah (kaum Partikelir) yaitu sejumlah pengusaha Eropa dan saudagar Cina.⁹ Tanah partikelir ini muncul akibat terjadinya praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh Belanda sejak VOC berkuasa antara Tahun 1620—1799. Praktek penjualan tanah ini juga didukung oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengeluarkan dekret *Staatblad van Nederlandsch-Indie* 1836 nomor 19 soal *Reglement Omtrent de Particuliere Landerijen, Gelegen ten Westen der Rivier Tjimanoe* alias peraturan tentang tanah partikelir di sebelah barat Sungai Cimanuk, mengatur bagaimana soal sewa, jual-beli, dan pengelolaan tanah. Termasuk di Bekasi. Dalam aturan itu, tuan tanah juga diberikan hak istimewa dalam mengatur tenaga kerjanya.

Di tanah partikelir ditempatkan kepala desa atau demang, yang diangkat oleh residen dan digaji oleh tuan tanah. Kepala desa dibantu oleh seorang juru tulis, seorang kepala kampung atau lebih, alim ulama (amil), seorang pencalang (pegawai politik desa), seorang kebayan (pesuruh desa), dan seorang ulu-ulu

⁸ Pemda Jawa Barat, *Sejarah Jawa Barat* (Bandung: Pemda Provinsi Jawa Barat, 1993), 461–62.

⁹ Robert Cribb, *Jakarta in the Indonesia Revolution 1945-1949* (Jakarta: Grafiti, 1990), 30.

(penguasa pertanian).¹⁰ Untuk pengawasan tanah, biasanya para tuan tanah mempekerjakan pegawai atau pembantu dekatnya yang disebut *Potia* atau *S'lands opziener*. Seorang yang menjabat potia harus berasal dari keturunan Cina, dan biasanya diangkat oleh tuan tanah secara pribadi atau atas dasar persaudaraan.¹¹ Potia ini bertugas menjalankan dan mengawasi para pekerja, serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada di tempat. Sehingga seluruh pekerja harus mematuhi perintah potia sebagai wakil tuan tanah dan menerima laporan dari mandor. Seorang mandor biasanya mengawasi sebidang tanah, yang sering disebut dengan wilayah kemandoran. Beberapa wilayah kemandoran ini berada di bawah kekuasaan seorang camat polisi atau camat tanah, yang kedudukan dan kekuasaannya sebanding dengan kepala pemerintahan wilayah kecamatan sekarang.

Dalam prakteknya, mandor ini sering bertindak melampaui batas kemanusiaan terhadap pekerja, yang kebanyakan di antaranya adalah pemilik sebelumnya. Hal ini tidak mengherankan karena kebanyakan para mandor berasal dari para jagoan atau jawara yang ditakuti rakyat.

Hampir seluruh wilayah Bekasi terdiri atas tanah-tanah persawahan yang luasnya sekitar 65.000 Ha. Di daerah Setu dan Lemahabang (bagian Kabupaten Bekasi), selain terdiri atas persawahan juga terkenal sebagai tanah perkebunan yang banyak menghasilkan buah-buahan. Perkebuna karet terdapat di daerah Cakung (Bojongrangkong), Pondok Gede, dan Tambun. Bagian Utara distrik Bekasi adalah daerah rawa-rawa (ranca atau meras) yang sulit ditanami. Tanah Rawa tersebut banyak diberikan kepada penduduk pribumi dengan membayar sewa (cukai) sebanyak 20% dari hasil panen kepada tuan tanah yang berada di wilayah kepemilikannya.¹²

Hampir seluruh mata pencaharian utama penduduk bekasi adalah bercocok tanam, yakni menanam padi dan palawijaya, sebagian kecil membuat kerajinan-kerajinan tangan seperti anyaman bambu dan lainnya. dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya di Keresidenan Batavia, penanaman padi di distrik bekasi ini jauh lebih baik. Hasil padi di distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul setiap *bau* (1 *bau*=7096,5M² atau 0,8Ha), sedangkan di distrik-distrik lainnya hanya mampu menghasilkan padi antara 15-30 pikul setiap *bau*. Usaha pertanian tersebut dikerjakan di tanah milik secara turun-temurun, tanah usaha (tanah partikelir) dan tanah sewaan.

¹⁰ J. Tideman, *Tanah Dan Penduduk Di Indonesia; Penduduk Kabupaten Batavia, Meester Cornelis, Dan Buitenzorg*, ed. Hasan Basrti (Jakarta: Bhratara, 1974), 54.

¹¹ Pemda Kabupaten Bekasi, *Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru* (Bekasi: Pemda Kab.Bekasi, 1992), 19.

¹² Husein Kamaly, *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bekasi, Stensilan* (Bekasi: t.p, 1973), 6.

Mobilitas penduduk di distrik Bekasi cukup tinggi. Perubahan tersebut bisa dilihat dari jumlah penduduk daerah itu pada tahun 1927 adalah 162.000 jiwa, terdiri dari 30 penduduk Eropa, 7.500 penduduk Timur Asing, dan 156.470 jiwa penduduk pribumi. Menurut hasil laporan serah terima jabatan Residen Batavia, L.C.C.A van der Hoek, jumlah penduduk meningkat menjadi lebih dari 200.000 jiwa pada tahun 1940.

Dalam menunjang mobilitas penduduk di distrik Bekasi dan hubungan antar daerah dibangun sarana jalan raya antara Batavia-Karawang, sarana transportasi lainnya adalah jalur kereta api besar yang menghubungkan antara Batavia-Bandung, melalui cikampek. Selain itu dalam bidang pendidikan juga terdapat beberapa sekolah. Di distrik Bekasi terdapat pula tiga buah sekolah rakyat dan empat buah sekolah kelas dua.¹³

Dengan berkuasanya pemerintahan tentara Jepang di Keresidenan Jatinegara, khususnya di distrik Bekasi, tidak membawa perubahan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Karena pemberlakuan sistem ekonomi perang, yakni hasil pertanian seperti padi dan palawija serta hewan yang ada di *Bekasi Gun* dicatat, dihimpun, dan wajib diserahkan pada penguasa militer Jepang. Rakyat bekasi pun mengalami keterpurukan akibat pemerasan tersebut yang berlangsung tahun 1942-1945. Keadaan semakin buruk dengan diperlakukannya *Romusha* (kerja paksa) sehingga yang tinggal kebanyakan para orang tua, anak-anak, dan wanita.¹⁴

Pemerintah militer Jepang mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi dan pengawasannya. Harta milik Belanda dirampas dan menjadi milik pemerintah Jepang. Tanah-tanah partikelir diurus oleh suatu kantor yang dinamakan *Siryooti Kanrikoosya*, berdasarkan undang-undang Balatentara *Dai Nippon* No 17 tanggal 1 Juni 2602 (1942). Sebelum itu dinyatakan dalam pasa 1 undang-undang No 17 tersebut bahwa: “*Sekalian tanah pasrtikelir menjadi kepunyaan balatentara Dai Nippon sejak undang-undang ini mulai berlaku. Tetapi tanah parikelir kepunyaan bangsa Indonesia untuk sementara waktu keadaanya tetap sebagai biasa*”

Bagi penduduk distrik Bekasi, undang-undang tanah-tanah partikelir tersebut tidak membawa perbaikan apapun, bahkan sebaliknya. Terkait undang-undang ini dalam harian Asia Raya tanggal 2 Juni 2602 (1942) dimuat penjelasan yang ditujukan pada penduduk dan tuan-tuan tanah. Dejalaskan bahwa: “*walaupun tanah-tanah itu diambil dari tuan tanah, janganlah disangka bahwa tuan dalam segala hal bebas dari kewajiban tuan tentang tanah itu. terlebih dahulu hendaklah tuan ketahui, bahwa walaupun tanah-tanah itu sudah pindah ke bawah pengawasan Pemerintah Balatentara Dai Nippon hal itu sekali-kali tidak berarti*

¹³ Tideman, *Tanah Dan Penduduk Di Indonesia; Penduduk Kabupaten Batavia, Meester Cornlis, Dan Buitenzorg*, 69.

¹⁴ Kodam V/Jaya, *Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, Dan Bekasi: Dalam Menegakan Kemerdekaan RI* (Jakarta: Kodam V/Jaya dan PT Virgo, 1975), 126–27.

bahwa tanah-tanah itu diberikan kepada rakyat biasa yang mendiami tanah itu...lagi pula janganlah dipikir bahwa tuan tidak lagi mempunyai kewajiban sampai sekarang. Kalau ada orang berpikir seperti diatas itu, maka pikiran itu salah sekali. Pada waktu ini tuan-tuan mesti juga melakukan sekalian kewajiban tuan, seperti membayar sewa tanah, atas melakukan pekerjaan Rodi atau kerja paksa. Cuma saja sekalian kewajiban mesti dilaksanakan itu bukan tuan tanah yang dahulu, tetapi untuk pemerintah Dai Nippon...Tuan-tuan hendaklah...bekerja keras untuk Balatentara Dai Nippon dan menambah hasil yang tuan dapat...". Sehingga bagi rakyat di distrik Bekasi, tanah-tanah partikelir itu tetap bersifat tanah partikelir, yang berganti hanyalah tuan tanahnya.

Menurut konsepsi masyarakat Bekasi, orang terpadang adalah orang kaya yang memiliki banyak tanah, baik berupa sawah maupun tanah lapang dan mampu menunaikan ibadah haji. Status haji memiliki kedudukan terpadang meskipun untuk membayar biaya haji ini harus menjual tanah atau menggadaikannya.

Struktur sosial masyarakat Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan atas (priyayi) dan golongan bawah. Golongan atas merupakan golongan yang memerintah pada masa kolonial terdiri dari bupati, patih, sekretaris keresidenan, wedana, camat, demang, juru tulis, kepala kampung, amil, pencalang, kebayan, ulu-ulu, potiah, mandor, dan para tuan tanah. Sedangkan golongan bawah terdiri dari petani, buruh tani, pedagang, dan lainnya.

Golongan atas ini secara kuantitas jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan golongan bawah. Meskipun golongan atas jumlahnya sedikit, namun mereka memiliki kedudukan yang lebih mencolok dibandingkan dengan golongan bawah. Pada pihak golongan atas terdapat legitimasi untuk menjalankan kekuasaan serta mempunyai hak istimewa atas pelayanan dan pengabdian dari golongan bawah dan golongan bawah harus menerima segala macam kewajiban serta situasi kehidupan. Hubungan ini terjadi dari sistem yang secara struktural diciptakan dan dipaksakan oleh kolonial dalam melanggengkan kekuasaan di Indonesia walaupun dalam beberapa kasus ada perlawanan dari golongan bawah, misalnya kasus perlawanan petani di Tambun (1869).

Selain itu, terdapat kelompok lain yang cukup memiliki peranan dalam masyarakat Bekasi, yakni kelompok rohaniawan Islam yang biasanya terdiri dari kiyai, amil, dan ustaz. Ketiga kelompok ini memiliki peranan dan posisi yang berbeda-beda yakni sebagai berikut:

Kiyai, biasanya menduduki posisi tertinggi yang tampak dari cara pengormatan, nasihat, dan fatwanya menjadi tolak ukur dalam setiap kegiatan keagamaan masyarakat Bekasi. Biasanya mereka juga memiliki pondok pesantren dan masjid serta aktif dalam kemasyarakatan.

Amil, merupakan suatu kedudukan forma yang dibuat oleh pemerintah kolonial dalam menangani urusan-urusan keagamaan dalam masyarakat, misalnya pernikahan, perceraian, kematian, dan zakat.

Ustaz, biasanya merupakan guru mengaji anak-anak, baik di rumah atau di langgar. Umumnya mereka lulusan dari pesantren dan setelah lulus mengabdikan imu agamanya untuk masyarakat lingkungannya.

E. Struktur Ekonomi

Masyarakat di kewedanan Bekasi masih bertumpu pada sektor agraria. Hal tersebut terlihat dari struktur sosial masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan tanah dan penguasaan tanah, melainkan terlihat pula pada struktur ekonominya. Sebagian besar mereka tinggal di daerah perkampungan yang antar kampung dipisahkan oleh sawah, kebun, rawa, atau sungai dengan sifat ekonominya tertutup. Ketertutupan ini ditandai dengan hampir seluruh kebutuhan hidup warganya dicukupi oleh daerah itu sendiri yang menyebabkan kebutuhan pada perdagangan dan penggunaan uang relatif terbatas.

Sistem ekonomi yang tertutup ini merupakan akumulasi dari sistem yang diciptakan kaum kolonial yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan dagang dengan pedagang dari luar, dikarenakan sistem perdagangan monopoli yang dijalankan pada masa VOC dan sistem penyerahan wajib. Meskipun pada masa *Bataafshe Republiek* antara tahun 1795-1806, khususnya pada masa Gubernur Jenderal Dir van Hogendorp (1799-1808), dilakukan perubahan di tingkat daerah, yakni keududukan bupati dan penguasa daerah diatur kembali, kepemilikan tanah atau penguasaannya sebagai sumber pemerasan dicabut. Tanah dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas.

Sebagai ganti penyerahan wajib diberlakukan pajak berupa hasil bumi. Diharapkan dengan sistem baru ini rakyat akan lebih giat lagi menanam dan mengolah hasil pertanian seperti kopi, beras, lada, coklat, kapas, dan minyak kelapa.¹⁵ namun kebijakan ini tidak berjalan mulus disebabkan keengganan para pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya kepada rakyat, bahkan sebaliknya tanah pastikelir semakin bertambah banyak termasuk di Batavia. Ini akibat dari lemahnya sistem kontrol dan terbatasnya tenaga administrasi pemerintah kolonial sehingga tidak mampu mencegah kecurangan yang dilakukan para tuan tanah.¹⁶

Pada masa Gubernur Jenderal Herman William Daendels tahun 1806-1811, kondisi ekonomi dan pertanahan di Bekasi semakin parah. Daendels menjual tanah yang dikuasainya. Tanah yang dikuasainya tersebut berdasarkan surat usulan tanggal 22 Maret 1808 dan surat keputusan tanggal 9 Agustus 1808, tanah-tanah di sekitar *Batavia* dan *Buitenzorg* yang meliputi: Kedong Badang, De Nambo, Bekasi, Papisangan, Durian Seribu, Bojong Sari, Curug atau Cinangka

¹⁵ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 Dari Imperium Sampai Imperium, Jilid I* (Jakarta: Gramedia, 1987), 290-91.

¹⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 283.

dijual kepada masyarakat dengan harga seluruhnya 192.000 Rijkds.¹⁷ tentu saja penjualan tanah ini dimanfaatkan oleh kaum partikelir yang berasal dari etnis Cina dan Eropa karena mereka yang memiliki uang.

Masa Thomas Stamford Raffles tahun 1811-1816 tidak jauh berbeda. Untuk meningkatkan pendapatan dan menutup defisit keuangan pemerintah, Raffles menjual tanah termasuk di Bekasi. Total penjualan tanah 1.493.500 Rijkds.¹⁸ Kebijakan Raffles untuk menerapkan sistem sewa tanah dan penanaman tanaman ekspor di Batavia mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan mayoritas tanah di sekitar *Batavia* dimiliki perseorangan (partikelir).

Periode sistem politik ekonomi liberal antara tahun 1870-1900, Raffles membuka areal perkebunan karet di distrik Bekasi, tetapi itu bukan milik pribumi masyarakat Bekasi, melainkan milik China dan Eropa. Orang Bekasi hanya menjadi buruh di perkebunan karet tersebut. Luas tanah yang dimiliki partikelir hampir tiga per empat wilayah Bekasi. Bahkan menurut Residen Batavia, L.G.C.A. Van der Hoek, sampai tahun 1934 distrik Bekasi dan Cikarang seluruhnya masih berupa tanah partikelir.¹⁹

Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945, pasukan Jepang di Bekasi menginstruksikan rakyat Bekasi untuk melakukan pembongkaran dan penjarahan seluruh harta dari toko-toko orang Cina. Rakyat pun dengan antusias menyerbu toko tersebut. Penyerbuan ini dilandasi balas dendam terhadap para tuan tanah Cina yang banyak menguasai tanah dan telah menindas serta menjadi antek Belanda. Dalam satu hari saja, hampir seluruh rumah dan toko milik orang Cina diserbu dan dikuasai, terutama di daerah Kranji dan Tambun. Akibatnya banyak orang Cina dan Eropa meninggalkan Bekasi.²⁰ Namun, itu hanya bersifat sementara karena kemudian tentara pendudukan Jepang menerapkan sistem ekonomi perang yang mewajibkan masyarakat menyerahkan hasil pertanian, peternakan, dan lain-lainnya kepada Jepang sehingga pada masa itu keadaan ekonomi masyarakat Bekasi menjadi lebih buruk.

F. Struktur Budaya

Identifikasi budaya masyarakat Bekasi pada masa kolonial masih bersifat agraris-agamis karena “tanah” tidak hanya berfungsi ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Hal itu dapat dilihat dari pranata-pranata budaya yang berlaku dalam masyarakat Bekasi. Pranata pertama adalah “mata pencaharian pokok

¹⁷ Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; 1500-1900 Dari Imperium Sampai Imperium, Jilid I*, 216-17.

¹⁸ Bekasi, *Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru*, 19.

¹⁹ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), 48.

²⁰ Bekasi, *Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman Sampai Orde Baru*, 36.

bercocok tanam” yang terbagi dalam beberapa jenis pekerjaan, yakni sebagai berikut:

- Sebagai petani pemilik lahan pertanian, jumlahnya sedikit.
- Sebagai buruh tani jumlah terbesar dari penduduk Bekasi.
- Sebagai pedagang tetap dan musiman, pada saat paceklik berdagang apa saja.
- Sebagai pengrajin anyaman bambu untuk bahan membuat rumah.
- Sebagai nelayan tambak untuk didaerah-daerah pantai seperti Cabangbungin.
- Sebagai peternak berupa sapi, kambing, ayam, babi.

Dilihat dari jenis-jenis pekerjaan tersebut, dapat diketahui bahwa tanah memiliki fungsi ekonomi begitu dominan dengan berbagai variannya.

Pranata kebudayaan kedua adalah fungsi rumah bagi masyarakat Bekasi yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai kegiatan sosial, kepercayaan, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya masyarakat Bekasi juga menyelenggarakan pertemuan kampung atau mengadakan kenduri (hajatan). Dari bentuk arsitektur rumah-rumah asli penduduk Melayu-Bekasi berbentuk seperti goglo ala Betawi. Hampir seluruh bilik rumah yang terbuat dari kayu bisa dibuka sehingga bisa menampung banyak orang yang datang. Ini berarti pula tidak ada satu [un yang perlu dirahasiakan dari isi rumah.²¹

Pranata kebudayaan ketiga masyarakat Bekasi adalah kelompok sosial yang ada pada masa itu adalah pertama kelompok sosial yang berdasarkan hubungan kekerabatan (virioikal) yang luas, biasanya terjalin cukup akrab dengan fungsi gotong royong dan toleransi dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama. kedua kelompok ke-RTan yang dibentuk masa Jepang tidak hilang begitu saja, namun tetap dipakai dalam bermasyarakat dan pemerintahan. Kelompok ketiga kelompok sosial perkampungan (komunal). Ikatan ini terjalin biasanya dengan gotong royong membuat rumah, bertani, menjaga lingkungan atau ronda bersama.

Pranata lainnya adalah pranatan perilaku sosial, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bekasi, misalnya kebiasaan bertegur sapa antar warga kampung.dengan bahasa akrab, atau salam dan mencium tangan pada para sesepuh atau kiai, dan mengirimkan makanan pada tetangga sekita saat mengadakan acara hajatan.

Dalam pranata kesenian masyarakat Bekasi menunjukkan kemampuan untuk menangkap jiwa zamannya, misalnya isi cerita lenong yang bercerita tentang masa partikelir, wayang bercerita Mahabrata meskipun isinya juga tentang dakwah Islam dan sebagainya.

²¹ Hariyuddin, *Pergeseran Kultural Di Kampung Urban: Studi Di Kampung Pintu Air, Bekasi Selatan* (Jakarta: Depag RI, 1996), 43.

Kesimpulan

Bekasi pada masa kolonial merupakan sebuah kewedanan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Bekasi merupakan salah satu distrik (kewedanan) *regenschap Meester Cornelis*, residensi Batavia. Lalu setelah kedatangan Jepang berganti nama menjadi *Bekasi Gun*. Daerah ini dihuni oleh beberapa etnis. Sehingga mempengaruhi kebudayaan yang beragam dalam Masyarakat Bekasi.

Kondisi Bekasi selama masa kolonial dipenuhi tanah partikelir. Sehingga mempengaruhi kondisi masyarakat pada masa itu. Dalam struktur sosial, masyarakat Bekasi terbagi dalam dua golongan atas dan bawah. Golongan atas yakni ia yang berkuasa dalam pemerintahan dan yang menguasai tanah yang luas. Golongan bawah yakni ia yang menyewa tanah dari para tuan tanah dan juga rakyat biasa. Selain itu juga ada golongan lain yang berperan dalam urusan sosial dan keagamaan masyarakat.

Mayoritas masyarakat Bekasi bekerja pada sektor agraris. Banyak dari mereka menderita akibat adanya tanah partikelir. Dikarenakan mereka harus membayar sewa tanah maupun wajib pajak yang tinggi dari hasil pertanian mereka. Lalu pada pendudukan Jepang, kondisi masyarakat Bekasi semakin memburuk. hal ini dikarenakan mereka harus menyerahkan juga hasil pertanian serta hewan ternak.

Struktur kebudayaan masyarakat Bekasi juga dipengaruhi oleh kondisi pertanahan. Selain itu, juga terdapat beberapa pranata-pranata kebudayaan lainnya dalam masyarakat Bekasi yang merupakan campuran budaya Sunda, Jawa, Cina, Eropa (barat), dan Islam.

Daftar Sumber

Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Memoir van Overgave (serah terima jabatan) 1921-1930; Jawa Barat* (Jakarta: Arsip Nasional RI, 1976)

Geweestelijk Bestuur Batavia, *RegeeringAlamanak* (1927).

Oendang-oendang No. 30 tentang Mengoebah Nama Negeri dan Nama Daerah.
Kan Po No. 2 tahun ke 1 bulan 9-2602

Books

Abdullah , Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.

Cribb, Robert. *Jakarta in the Indonesia Revolution 1945-1949*. Jakarta: Grafiti, 1990.

Encyclopedia van Nederlandsch-Indie (ENI), 's (Gravenhage: Martinus Nijhof, 1917).

Hariyuddin. *Pergeseran Kultural di Kampung Urban: Studi di Kampung Pintu Air, Bekasi Selatan*. Jakarta: Depag RI, 1996.

Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesai Baru; 1500-1900 dari Emperium sampai Imperium*, Jilid I. Jakarta: Gramedia, 1987.

Kamaly, Husein. *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bekasi*, Stensilan. Bekasi: t.p, 1973.

Kodam V/Jaya. *Sejarah Perjuangan Rakyat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi: dalam Menegakan Kemerdekaan RI*. Jakarta: Kodam V/Jaya dan PT Virgo, 1975.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Mr. L. W. C. Van den Berg, *Het Inlandshe Gemeentewezen op Java en Madoera*, dalam BKI (1901)

Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah nasional indonesia*, Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Pemda Jawa barat, *Sejarah Jawa Barat*, Bandung: Pemda Provinsi Jawa Barat, 1993.

Pemda Kabupaten Bekasi, *Sejarah Bekasi: sejak pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru* (Bekasi: Pemda Kab.Bekasi, 1992).

Suparman, Nana. *Mengenal Bekasi Kota Patriot*. Bekasi: Rahman Press, 1985.

Tideman, J. *Tanah dan Penduduk di Indonesia; Penduduk Kabupaten Batavia, Meester Cornelis, dan Buitenzorg*, (terjemahan Hasan Basrti). Jakarta: Bhratara, 1974.